# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB)

*Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Entitas berkedudukan di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mempunyai tugas dan fungsi Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berkomitmen dengan visi “Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kepada Kementerian negara/Lembaga;
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus;
- Meningkatnya perlindungan khusus anakkepentingan;
- Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

*Pendahuluan*

## A.2. Pendahuluan

Paket Undang-undang regulasi pengelolaan keuangan beserta turunannya membawa atmosfir baru terhadap tata kelola keuangan pemerintah dengan berbagai penyempurnaan-penyempurnaannya, ini semua untuk memenuhi keinginan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat diterima secara umum. Adanya pergeseran-pergeseran terhadap penerapan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi, yang artinya bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan berkewajiban untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dengan melaporkan secara periodik dan berjenjang.

Selain itu laporan keuangan merupakan potret realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja pada setiap SKPD pada tahun berkenaan, tercermin dalam tabel perangkaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Namun demikian untuk memudahkan pengungkapan secara naratif atas pergerakan angka tersebut diatas maka dapat dipahami melalui catatan atas laporan keuangan.

*Maksud dan Tujuan*

### A.2.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

a). Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c). Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d). Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

e). Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

f). Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

*Dasar Hukum*

## A.2.2. Dasar Hukum

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);

14). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9);

15). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

16). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 9);

17). Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 48) dan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68);

18). Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);

19). Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 51);

20). Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 34);

21). Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 40);

22). Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 28);

23). Keputusan Kepala DPKAD Nomor 915/158-SK.PPKD/IX/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

## A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SIMRAL terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dan Aplikasi Teknologi Informasi Silus Barang Daerah (ATISISBADA). SIMRAL dan ATISISBADA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan ATISISBADA adalah sistem yang menghasilkan informasi perencanaan, penerimaan dan distribusi, penatausahaan, pemeliharaan aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## A.3. Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) adalah sebagai berikut:

*Dasar Pengukuran*

## A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

## A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

### (1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

### (2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

*Beban*

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

### (5) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

## Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan.

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kas tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

## Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Pituang Jangka Panjang*

### Pituang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

### Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimilki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

## (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities), Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan, Perubahan Valuta Asing.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

## (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*

## (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada penjelasan tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|---|---|---|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |

*Penyusutan Aset Tetap*

## (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dalam penjelasan tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|---|---|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun |

*Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali*

### (10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp0

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 December 2019 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 00,00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan dinas tidak mengelola pendapatan.

Realisasi Belanja Rp30.539.734.850

## BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 adalah sebesar Rp30.539.734.850 atau 94,06 persen dari anggaran senilai Rp32.467.817.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 December 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 December 2019*

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 17.226.500.000 | 16.549.716.441 | 96,07 |
| Belanja Barang | 13.856.793.400 | 12.716.145.804 | 91,77 |
| Belanja Modal | 1.384.523.600 | 1.261.326.192 | 91,10 |
| Belanja Bantuan Hibah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Total Belanja Bruto*** | ***32.467.817.000*** | ***30.539.734.850*** | ***94,06*** |
| ***Pengembalian Belanja*** | | ***12.546.413*** | ***0,00*** |
| ***Belanja Netto*** | ***32.467.817.000*** | ***30.527.188.437*** | ***94,02*** |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

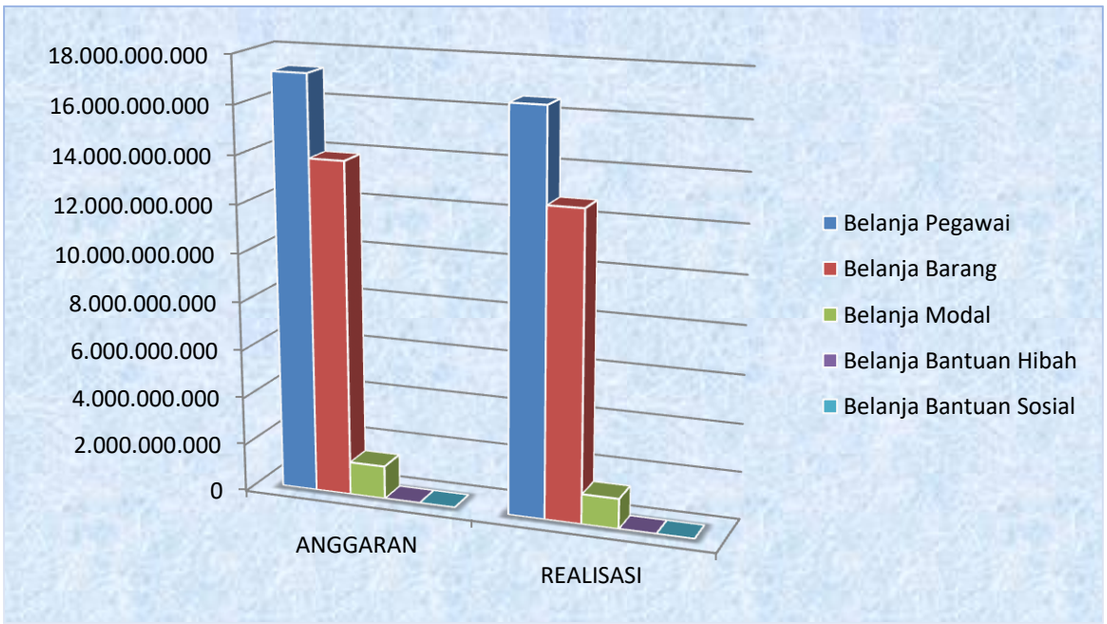


Realisasi Belanja per 31 December 2019 sebesar 94,06 persen jika dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Komposisi Realisasi Belanja per 31 December 2019 diperbandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

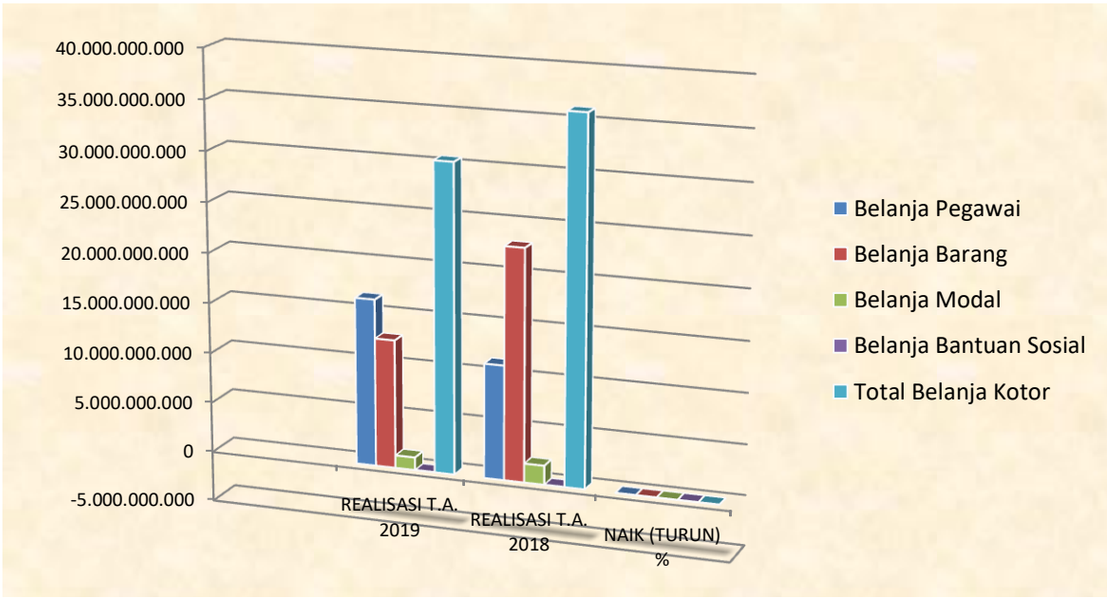


Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, Realisasi Belanja per 31 December 2019 mengalami penurunan sebesar -15,50 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya regulasi dan peraturan yang membatasi dalam Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja per 31 December 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | NAIK (TURUN) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 16.549.716.441 | 11.332.325.648 | 46,04 |
| Belanja Barang | 12.716.145.804 | 22.903.867.330 | -44,48 |
| Belanja Modal | 1.261.326.192 | 1.889.701.543 | -33,25 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| **Total Belanja Kotor** | **30.527.188.437** | **36.125.894.521** | **-15,50** |

*Belanja Pegawai Rp16.549.716.441*

## B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2019 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.549.716.441 dan Rp11.332.325.648 Berdasarkan Tabel, realisasi belanja 31 December 2019 mengalami kenaikan sebesar 46,04 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan Beban Kerja.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3.161.608.287 | 2.824.394.100 | 11,94 |
| Belanja Tunjangan Keluarga | 270.724.316 | 253.197.888 | 6,92 |
| Belanja Tunjangan Jabatan | 247.100.000 | 247.100.000 | 0,00 |
| Belanja Tunjangan Umum | 109.185.000 | 103.365.000 | 5,63 |
| Belanja Tunjangan Beras | 152.733.780 | 153.313.140 | -0,38 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4.877.661 | 3.358.498 | 45,23 |
| Belanja Pembulatan Gaji | 50.043 | 38.173 | 31,10 |
| Belanja Iuran BPJS Kesehatan | 88.287.236 | 79.197.568 | 11,48 |
| Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan | 25.418.593 | 28.513.990 | -10,86 |
| Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja | 12.087.881.525 | 7.583.447.291 | 59,40 |
| Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja | 0 | 16.500.000 | -100,00 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 29.800.000 | 39.900.000 | -25,31 |
| Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Uang Honor Tetap | 372.050.000 | 0 | 0,00 |
| Belanja Vakasi | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Uang Lembur | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***16.550.512.854*** | ***11.333.125.648*** | ***46,04*** |
| *Pengembalian Belanja* | *796.413* | *800.000* | *-0,45* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***16.549.716.441*** | ***11.332.325.648*** | ***46,04*** |

Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini merupakan Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2019 mengalami kenaikan sebesar 46,04 persen .

*Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2019*

| URAIAN JENIS BELANJA | ANGGARAN T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2019 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3.239.780.978 | 3.161.608.287 | 97,59 |
| Belanja Tunjangan Keluarga | 311.500.000 | 270.724.316 | 86,91 |
| Belanja Tunjangan Jabatan | 256.961.625 | 247.100.000 | 96,16 |
| Belanja Tunjangan Umum | 130.600.671 | 109.185.000 | 83,60 |
| Belanja Tunjangan Beras | 176.820.459 | 152.733.780 | 86,38 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 14.000.000 | 4.877.661 | 34,84 |
| Belanja Pembulatan Gaji | 97.778 | 50.043 | 51,18 |
| Belanja Iuran BPJS Kesehatan | 104.218.645 | 88.287.236 | 84,71 |
| Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan | 33.544.844 | 25.418.593 | 75,77 |
| Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja | 12.427.825.000 | 12.087.881.525 | 97,26 |
| Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja | 0 | 0 | 0,00 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 148.650.000 | 29.800.000 | 20,05 |
| Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Uang Honor Tetap | 382.500.000 | 372.050.000 | 0,00 |
| Belanja Vakasi | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Uang Lembur | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***17.226.500.000*** | ***16.550.512.854*** | ***96,08*** |
| ***Pengembalian Belanja*** | ***0*** | ***796.413*** | ***0,00*** |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***17.226.500.000*** | ***16.549.716.441*** | ***96,07*** |

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2019 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp17.226.500.000 terrealisasi sebesar Rp16.549.716.441 atau sebesar 96,07persen sehingga belanja pegawai tidak terrealisasi 100 persen, hal ini disebabkan pada saat perubahan anggaran adanya penambahan anggaran namun tidak dapat di realisasikan terbentur dengan regulasi yang ada.

*Belanja Barang Rp12.716.145.804*

## B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran 31 December 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12.716.145.804 dan Rp22.903.867.330.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran Per 31 December 2019 mengalami penurunan -44,48 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang operasional yang cukup signifikan di samping naiknya biaya pemeliharaan Tahun Anggaran 2019.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Barang Operasional | 1.208.106.849 | 15.372.414.102 | -92,14 |
| Belanja Jasa | 9.691.151.094 | 5.708.809.700 | 69,76 |
| Belanja Pemeliharaan | 358.235.902 | 263.510.604 | 35,95 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 1.458.651.959 | 1.559.132.924 | -6,44 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***12.721.695.804*** | ***22.903.867.330*** | ***-44,46*** |
| *Pengembalian Belanja* | *5.550.000* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***12.716.145.804*** | ***22.903.867.330*** | ***-44,48*** |

Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran Per 31 December 2019 mengalami penurunan sebesar -44,48 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya belanja barang operasional yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan regulasi-regulasi di samping naiknya biaya pemeliharaan Tahun Anggaran 2019.

**LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | URAIAN | ANGGARAN T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2019 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|
| | **Program Tata Kelola Pemerintahan** | **4.976.613.550** | **4.302.480.269** | **86,45** |
| 1 | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset | 108.578.000 | 92.960.690 | 85,62 |
| 2 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 233.183.800 | 225.026.400 | 96,50 |
| 3 | Pengadaan Sarana Prasarana Kantor | 1.516.523.600 | 1.387.206.192 | 91,47 |
| 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 520.150.000 | 306.413.952 | 58,91 |
| 5 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | 1.844.630.950 | 1.560.151.194 | 84,58 |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 31.489.000 | 28.489.000 | 90,47 |
| 7 | Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah | 468.067.000 | 458.268.841 | 97,91 |
| 8 | Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan | 20.000.000 | 18.608.000 | 93,04 |
| 9 | Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan | 233.991.200 | 225.356.000 | 96,31 |
| | **Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera** | **3.805.205.850** | **3.583.688.350** | **94,18** |
| 10 | Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak | 563.532.000 | 540.188.000 | 95,86 |
| 11 | Peningkatan kualitas hidup perempuan | 1.822.416.000 | 1.685.227.500 | 92,47 |
| 12 | Peningkatan kualitas keluarga | 1.419.257.850 | 1.358.272.850 | 95,70 |
| | **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak** | **3.075.935.000** | **3.043.660.500** | **98,95** |
| 13 | Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 1.536.855.000 | 1.519.098.500 | 98,84 |
| 14 | Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak | 1.006.030.000 | 995.112.000 | 98,91 |
| 15 | Perlindungan khusus terhadap anak | 533.050.000 | 529.450.000 | 99,32 |
| | **Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** | **2.049.539.600** | **1.734.941.699** | **84,65** |
| 16 | Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan | 152.283.000 | 134.072.600 | 88,04 |
| 17 | Pembinaan administrasi sebagai data dan informasi pencatatan sipil | 140.611.000 | 130.800.000 | 93,02 |
| 18 | Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil | 323.368.000 | 288.711.999 | 89,28 |
| 19 | Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) | 477.772.000 | 404.671.000 | 84,70 |
| 20 | Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK) | 477.731.600 | 370.724.100 | 77,60 |
| 21 | Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) | 477.774.000 | 405.962.000 | 84,97 |
| | **Program Kependudukan dan Keluarga Berencana** | **1.716.523.000** | **1.684.751.178** | **98,15** |
| 22 | Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk | 534.436.000 | 533.811.178 | 99,88 |
| 23 | Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana | 418.487.000 | 410.049.000 | 97,98 |
| 24 | Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana | 763.600.000 | 740.891.000 | 97,03 |
| | **Jumlah** | **15.623.817.000** | **15.623.817.000** | **100,00** |

Dapat dijelaskan bahwa ada kegiatan yang realisasinya masih di bawah 80 persen seperti Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di anggarkan sebesar Rp520.150.000,00 terrealisasi sebesar Rp306.413.952,00 atau sebesar 58,91%, hal ini disebabkan kondisi kendaraan yang masih tergolong bagus begitupula dengan APK (Alat Perlengkapan Kantor) yang ada di DP3AKKB masih tergolong baru yaitu pengadaan tahun 2018 dan 2019, begitu juga pada kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK) dianggarkan sebesar Rp477.731.600,00 terrealisasi sebesar Rp370.724.100,00 atau sebesar 77,60 persen hal ini disebabkan Evisiensi Belanja Akomodasi, Belanja Cetak dan Honor Tenaga Ahli.

Belanja Hibah Rp0

## B.4 *Belanja Hibah*

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Hibah TA 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima hibah dalam rangka pemberdayaan untuk mendukung rencana kerja strategis.

*Perbandingan Belanja Hibah TA 2019 dan TA 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Bantuan Hibah | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |
| *Pengembalian Belanja* | *0* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |

Belanja Bantuan Sosial Rp0

## B.5 *Belanja Bantuan Sosial*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mendukung rencana kerja strategis.

*Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan TA 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |
| *Pengembalian Belanja* | *0* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |

## BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah Rp0

## B.6 *Belanja Modal Tanah*

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal 31 December 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan penambahan tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |
| *Pengembalian Belanja* | *0* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.255.126.192*

## B.7 *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.255.126.192 dan Rp1.889.701.543 atau sebesar -33,58 persen.

Realisasi Belanja Modal per 31 December 2019 mengalami Penurunan sebesar -33,58 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti regulasi yang membatasi dalam belanja serta kebutuhan Dinas DP3AKKB merupakan Dinas baru sehingga diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung kerja.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 December 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 0 | 1.199.920.000 | -100,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 25.875.000 | 84.400.000 | -69,34 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) | 4.310.640 | 79.013.160 | -94,54 |
| Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 5.400.000 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 518.279.380 | 93.005.000 | 457,26 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 24.893.000 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih | 0 | 14.864.205 | -100,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur | 0 | 22.500.000 | -100,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Server Komputer | 341.348.080 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer | 201.746.010 | 22.400.640 | 800,63 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 69.061.400 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 8.161.532 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 1.094.300 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Kerja Pejabat | 5.496.100 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat | 12.876.100 | 68.445.250 | -81,19 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film | 0 | 281.965.900 | -100,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Fisual | 42.784.650 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepon | 0 | 9.187.388 | -100,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi | 0 | 14.000.000 | -100,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***1.261.326.192*** | ***1.889.701.543*** | ***-33,25*** |
| *Pengembalian Belanja* | 6.200.000 | 0 | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***1.255.126.192*** | ***1.889.701.543*** | ***-33,58*** |

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

## B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |
| *Pengembalian Belanja* | *0* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

## B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Jaringan | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |
| *Pengembalian Belanja* | *0* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |

Belanja Modal Lainnya Rp0

## B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan oleh pengadaan software untuk implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Software | 0 | 0 | 0,00 |
| Program Komputer | 0 | 0 | 0,00 |
| ***Jumlah Belanja Bruto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |
| *Pengembalian Belanja* | *0* | *0* | *0,00* |
| ***Jumlah Belanja Netto*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** |

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
## ASET LANCAR

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp17.490.545 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

| No | Jenis | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bend Peng DP3AKKB Prov Banten 0801000672 | Rp - | Rp - |
| 2 | Uang Tunai | Rp - | Rp 17.490.545 |
| Jumlah | | Rp - | Rp 17.490.545,00 |

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara Penerima Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 December 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

| No | Jenis | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Rp - | Rp - |
| 2 | Uang Tunai | Rp - | Rp - |
| **Jumlah** | | **Rp -** | **Rp -** |

### C.3 Kas di BLUD

*Kas di BLUD Rp0*

Saldo Kas di BLUD per tanggal 31 December 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di BLUD merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas di BLUD pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di BLUD*

| Jenis | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|
| | - | - |
| | - | - |
| **Jumlah** | **-** | **-** |

*Kas Lainnya Rp0*

## C.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 December 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya*

| Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|
| | - | - |
| | - | - |
| **Jumlah** | **-** | **-** |

*Setara Kas Rp64.646.000*

## C.5 Setara Kas

Saldo Setara Kas per tanggal 31 December 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pada tanggal pelaporan. Rincian Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar (TP/TGR)*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** |

*Bagian Lancar TPA Rp64.646.000*

## C.6 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per tanggal 31 December 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Investasi Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

*Investasi Jangka Pendek*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** |

*Piutang Pendapatan Rp0*

## C.7 Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Pendapatan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Piutang Pendapatan*

| Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | % | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|---|
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| **Total** | | | | **-** |

*Piutang Lainnya Rp0*

## C.8 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Piutang Lainnya*

| Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | % | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|---|
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| Total | | | | - |

*Penyisihan Piutang Rp0*

## C.9 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Penyisihan Piutang*

| Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | % | Nilai Penyisihan |
|---|---|---|---|---|
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| Total | | | | - |

*Beban Dibayar di Muka Rp0*

## C.10 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka*

| Debitur | Kualitas | Nilai Piutang | % | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| | | - | 0,00% | - |
| Total | | | | - |

*Persediaan Rp64.646.000*

## C.11 Persediaan

Nilai Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp16.575.840 dan Rp64.646.000 atau sebesar 0,00 persen. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Perbandingan Persediaan*

| Persediaan | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Alat Tulis Kantor | 9.855.840 | 32.684.500 | (70) |
| Alat Listrik dan Elektronik | - | 140.000 | (100) |
| Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | - | - | - |
| Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | - | 3.705.000 | (100) |
| Suku Cadang Peraltan Komputer/Printer/Jaringan | - | - | - |
| Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata | - | - | - |
| Perlengkapan Peserta/Panitia | - | - | - |
| Peralatan Dapur | - | - | - |
| Bahan Percontohan/Peraga/Praktek | - | - | - |
| Barang Cetak | 6.720.000 | 28.116.500 | (76) |
| Pakaian PDH | - | - | - |
| Pakaian Dinas Batik | - | - | - |
| Pakaian Kerja Lapangan | - | - | - |
| Pakaian Batik Tradisional | - | - | - |
| Pakaian Bercorak Kesenian | - | - | - |
| Hadiah Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Desa | - | - | - |
| Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat | - | - | - |
| Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan | - | - | - |
| Barang Non Kapitalis | - | - | - |
| **Jumlah** | 16.575.840 | 64.646.000 | (74) |

*Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp0*

## C.12 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. .

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2019 adalah sebagai berikut:

*Investasi Jangka Panjang Non Permanen*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Rp0*

## C.13 Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2019 adalah sebagai berikut:

*Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Investasi Dalam Obligasi Rp0*

## C.14 Investasi Dalam Obligasi

Saldo Investasi Dalam Obligasi per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Dalam Obligasi adalah sebagai berikut:

*Investasi Dalam Obligasi*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Investasi dalam Proyek Pembangunan Rp0*

## C.15 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan adalah sebagai berikut:

*Investasi Dalam Obligasi*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Dana Bergulir Rp0*

## C.16 Dana Bergulir

Saldo Dana Bergulir per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

*Dana Bergulir*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Deposito Jangka Panjang Rp0*

## C.17 Deposito Jangka Panjang

Saldo Deposito Jangka Panjang per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Deposito Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

*Deposito Jangka Panjang*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Investasi Non Permanen Lainnya Rp0*

## C.18 Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

*Investasi Non Permanen Lainnya*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Investasi Jangka Panjang Permanen Rp0*

## C.19 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut:

*Investasi Jangka Panjang Permanen*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0*

## C.20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

*Penyertaan Modal Pemerintah Daerah*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Investasi Permanen Lainnya Rp0*

## C.21 Investasi Permanen Lainnya

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 December 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

*Investasi Permanen Lainnya*

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | - |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| Jumlah | | | |

*Tanah Rp0*

## C.22 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp0. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2019. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | - |
| ***Mutasi tambah:*** | | |
| - Pembelian | Rp | - |
| ***Mutasi kurang:*** | | |
| - Penghentian aset dari penggunaan | Rp | - |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | - |

Rincian Tanah adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Tanah per 31 December 2019*

| No. | KIB | Luas | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Rp - |
| 2 | | | Rp - |
| Jumlah | | | Rp - |

*Peralatan dan Mesin Rp7.934.402.228*

## C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah Rp6.734.377.241 dan Rp7.934.402.228.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | **Rp** | **6.734.377.241,42** |
| ***Mutasi tambah:*** | | |
| - Pembelian | Rp | 1.261.326.192,00 |
| - Mutasi Masuk dari OPD Lain | Rp | 104.647.195,00 |
| - Hibah | Rp | - |
| - reklasifikasi dari aset lainnya | Rp | - |
| ***Mutasi kurang:*** | | |
| - Kapitaslisasi ke Ekstrakomptabel | Rp | 7.158.400,00 |
| - penghapusan | Rp | - |
| - reklasifikasi ke aset lainnya | Rp | 158.790.000,00 |
| **Saldo per 31 December 2019** | **Rp** | **7.934.402.228,42** |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2019 | Rp | (4.008.900.309,51) |
| **Nilai Buku Per 31 December 2019** | **Rp** | **3.925.501.918,91** |

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian
b. Penerimaan

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2019 adalah Rp1.261.326.192 dan Saldo Aset Tahun Anggaran 2018 dan Rp6.734.377.241 adanya mutasi masuk dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Tahun 2019 dan Rp104.647.195.

Mutasi Kurang Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2019 adalah Rp7.158.400 merupakan kapitalisasi ke ekstrakomptabel dan mutasi keluar Tahun Anggaran 2019 dan Rp158.790.000 terdiri dari mutasi keluar ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Tahun 2019 sebesar Rp22.031.000 dan reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp136.759.000 merupakan aset yang sudah dihapuskan sesuai dengan Berita Acara Penghapusan Aset Daerah.

*Gedung dan Bangunan Rp0*

## C.24 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 December 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

Mutasi Tambah pada Tahun 2019 sebesar Rp22.031.000 hasil reklas pencatatan dari belanja modal peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Gedung dan Bangunan namun aset tersebut di limpahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | - |
| Mutasi tambah: | | |
| - Pembelian | Rp | - |
| - koreksi pencatatan nilai | Rp | 22.031.000 |
| Mutasi kurang: | | |
| - koreksi pencatatan nilai | Rp | 22.031.000 |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2019 | | - |
| **Nilai Buku Per 31 December 2019** | Rp | - |

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Rp0*

## C.25 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2019 terjadi mutasi tambah sebesar Rp0. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | - |
| Mutasi tambah: | | |
| - Pembelian | Rp | - |
| - koreksi pencatatan nilai | Rp | - |
| Mutasi kurang: | | |
| - koreksi pencatatan nilai | Rp | - |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2019 | | - |
| **Nilai Buku Per 31 December 2019** | Rp | - |

*Aset Tetap Lainnya Rp26.965.000*

## C.26 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 December 2019 dan 2018 adalah Rp26.965.000 dan Rp22.965.000.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | 22.965.000 |
| Mutasi tambah: | | |
| - Pembelian | Rp | - |
| - Koreksi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesn | Rp | 136.759.000 |
| - Koreksi pencatatan nilai | Rp | 4.000.000 |
| Mutasi kurang: | | |
| - Koreksi pencatatan nilai | Rp | 136.759.000 |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | 26.965.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2019 | | - |
| **Nilai Buku Per 31 December 2019** | Rp | 26.965.000 |

Mutasi Tambah Rincian Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa kode rekening Belanja Barang Non Kapitalisasi Tahun Anggaran per 31 December 2019 adalah Rp136.759.000 berupa peralatan mesin yang sedianya akan dihapuskan, mutasi masuk sebesar Rp4.000.000 berupa matras berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Buku-buku Perpustakaan karena kesalahan pada saat penganggaran sehingga reklas dilakukan sesuai Berita Acara Aset Tetap Lainnya pada Saldo Aset Tahun Anggaran 2018 dan Rp22.965.000.

Mutasi Kurang Rincian Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran per 31 December 2019 adalah Rp4.000.000 berupa peralatan mesin yang sedianya akan dihapuskan, Rp136.759.000 berupa Aset Peralatan dan Mesin dilakukan sesuai Berita Acara Penghapusan Aset Tetap Lainnya.

*Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0*

## C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. .

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | - |
| Mutasi tambah: | | |
| - Rehab Berat Ruang Kelas | Rp | - |
| Mutas kurang: | | |
| - Gedung yang sudah selesai | | |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | - |

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rp4.008.900.310*

## C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar -Rp4.008.900.310 dan -Rp3.162.989.146.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2019 disajikan pada rincian dibawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2019*

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan 2019 | Akm. Penyusutan 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 7.934.402.228 | (4.008.900.310) | (3.162.989.146) |
| 2 | Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 26.965.000 | - | - |
| **Akumulasi Penyusutan** | | **7.961.367.228** | **(4.008.900.310)** | **(3.162.989.146)** |

*Aset Tak Berwujud Rp137.830.000*

## C.29 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud berupa Software Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah Rp66.043.542 dan Rp137.830.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, aset tak berwujud ini merupakan koreksi dari akun belanja barang dan jasa ke akun aset tak berwujud.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | 137.830.000 |
| Mutasi tambah: | | |
| - Pembelian | Rp | - |
| - koreksi pencatatan nilai | Rp | - |
| Mutasi kurang: | | |
| - koreksi pencatatan nilai | Rp | - |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | 137.830.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2019 | Rp | (71.786.458) |
| **Nilai Buku Per 31 December 2019** | Rp | 66.043.542 |

Rincian Aset Tak Berwujud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset tak Berwujud per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Nilai | |
|---|---|---|---|
| 1 | Software Aplikasi Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender | Rp | 44.165.000 |
| 2 | Software Aplikasi Peningkatan dan Pengembangan Layanan Masyarakat dalam Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Rp | 49.500.000 |
| 3 | Software Aplikasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana | Rp | 44.165.000 |
| 4 | Penyusutan | Rp | (71.786.458) |
| **Jumlah** | | **Rp** | **66.043.542** |

Terdapat mutasi untuk aset tak berwujud ini dari akun belanja barang dan jasa ke akun aset tak berwujud tahun 2019

*Aset Lain-Lain Rp0*

## C.30 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-lain merupakan barang milik daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) serta dalam proses penghapusan dari BMD.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo per 31 December 2018** | Rp | - |
| Mutasi tambah: | | |
| - reklasifikasi dari aset tetap | Rp | - |
| Mutasi kurang: | | |
| - penggunaan kembali BMD yang dihentikan | Rp | - |
| - penghapusan BMD | Rp | - |
| **Saldo per 31 December 2019** | Rp | - |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| **Nilai Buku per 31 December 2019** | Rp | - |

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat disajikan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi ...yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi senilai ...
- Penghapusan ...berupa ...senilai ...

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya - Rp71.786.458*

## C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 adalah -Rp71.786.458.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 December 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnyaper 31 December 2019*

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|---|---|---|---|
| Aset Tak Berwujud | Rp 137.830.000 | Rp (71.786.458) | Rp 66.043.542 |
| Aset Lain-lain | Rp - | Rp - | Rp - |
| Jumlah | Rp 137.830.000 | Rp (71.786.458) | Rp 66.043.542 |

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2019

*Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp0*

## C.32 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 December 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Utang Bunga Rp0*

## C.33 Utang Bunga

Nilai Utang Bunga per 31 December 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Adapun rincian Utang Bunga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang Bunga per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0*

## C.34 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Adapun rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Pendapatan Diterima Dimuka Rp0*

## C.35 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Utang Beban Rp0*

## C.36 Utang Beban

Saldo Utang Beban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Beban disajikan sebagai berikut:

*Rincian Utang Beban per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0*

## C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Utang Dalam Negeri Rp0*

## C.38 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Dalam Negeri sebagai berikut:

*Rincian Utang Dalam Negeri per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| Total | | Rp - | |

*Utang Jangka Panjang Lainnya Rp0*

## C.39 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

*Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | | Rp - | |
| 2 | | Rp - | |
| 3 | | Rp - | |
| **Total** | | **Rp -** | |

*Ekuitas Rp4.035.086.301*

## C.40 Ekuitas

Ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 sebesar Rp4.035.086.300,58 dan Rp3.776.990.681,68.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Rincian Ekuitas per 31 December 2019*

| No. | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | Rp 3.776.990.681,68 | Rp 2.586.717.695,42 |
| 2 | Koreksi Ekuitas | Rp(1.019.806.413,10) | Rp (764.074.556,74) |
| 3 | Aset Lancar | Rp 16.575.840,00 | Rp 64.646.000,00 |
| 4 | Belanja Modal | Rp 1.261.326.192,00 | Rp 1.889.701.543,00 |
| **Total** | | **Rp 4.035.086.300,58** | **Rp 3.776.990.681,68** |

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Operasional - LO Rp0*

### D.1 Pendapatan Operasional - LO

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Operasional - LO Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp - | Rp - | 0,00 |
| **Jumlah** | **Rp -** | **Rp -** | **0,00** |

Pendapatan Operasional pada Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat pendapat hibah.

*Beban Pegawai Rp16.177.666.441*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp16.177.666.441 dan Rp11.332.325.648 sehingga terjadi kenaikan sebesar 29,95 persen"

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO | Rp 3.161.608.287 | Rp 2.824.394.100 | 10,67 |
| Tunjangan Keluarga - LO | Rp 270.724.316 | Rp 253.197.888 | 6,47 |
| Tunjangan Jabatan - LO | Rp 247.100.000 | Rp 247.100.000 | 0,00 |
| Tunjangan Umum - LO | Rp 109.185.000 | Rp 103.365.000 | 5,33 |
| Tunjangan Beras - LO | Rp 152.733.780 | Rp 153.313.140 | -0,38 |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | Rp 4.877.661 | Rp 3.358.498 | 31,15 |
| Pembulatan Gaji - LO | Rp 50.043 | Rp 38.173 | 23,72 |
| Belanja Iuran BPJS Kesehatan - LO | Rp 88.287.236 | Rp 79.197.568 | 10,30 |
| Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan - LO | Rp 25.418.593 | Rp 28.513.990 | -12,18 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO | Rp 12.087.881.525 | Rp 7.583.447.291 | 37,26 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO | Rp - | Rp 16.500.000 | 0,00 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO | Rp 29.800.000 | Rp 39.900.000 | -33,89 |
| **Jumlah** | **Rp 16.177.666.441** | **Rp 11.332.325.648** | **29,95** |

*Beban Persediaan Rp1.243.112.409*

## D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.243.112.409 dan Rp2.493.995.949 mengalami penurunan sebesar -100,63 persen.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Persediaan Alat Tulis Kantor | Rp | 190.581.560 | Rp | 268.628.950 | -40,95 |
| Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | Rp | 17.896.500 | Rp | 20.260.000 | -13,21 |
| Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | Rp | 10.800.000 | Rp | 5.514.000 | 48,94 |
| Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Rp | 20.445.000 | Rp | 26.260.000 | -28,44 |
| Beban Persediaan Suku Cadang Peralatan | Rp | 25.627.999 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Persediaan Suku Cadang Alat Studio | Rp | 18.800.000 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Persediaan Suku Cadang | Rp | 121.500.000 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Persediaan Vandel, Plakat, Piala, Medali | Rp | 153.579.850 | Rp | 379.065.000 | -146,82 |
| Beban Persediaan Peralatan Dapur | Rp | 9.385.000 | Rp | 4.210.000 | 55,14 |
| Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Peralatan Olah Raga | Rp | - | Rp | 17.550.000 | 0,00 |
| Beban Persediaan Percontohan/Peraga/Praktek | Rp | 143.400.000 | Rp | 753.003.000 | -425,11 |
| Beban Persediaan Cetak | Rp | 531.096.500 | Rp | 1.019.504.999 | -91,96 |
| **Jumlah Beban Persediaan** | **Rp** | **1.243.112.409** | **Rp** | **2.493.995.949** | **-100,63** |

*Beban Jasa Rp10.063.201.094*

## D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp10.063.201.094 dan Rp18.307.971.401 mengalami penurunan sebesar -81,93 persen.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Jasa Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Jasa Bahan Bakar Minyak/Gas | Rp | 189.390.950 | Rp | 171.072.000 | 9,67 |
| Beban Jasa Perlengkapan Peserta/Panitia | Rp | 259.830.800 | Rp | 2.474.702.500 | -852,43 |
| Beban Jasa Bendera dan Umbul-umbul | Rp | 13.750.000 | Rp | 6.000.000 | 56,36 |
| Beban Jasa telepon/ Faksimili/Internet | Rp | 2.491.094 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Jasa Surat Kabar/Majalah | Rp | 29.040.000 | Rp | 27.357.000 | 5,80 |
| Beban Jasa TV Cable | Rp | 6.347.500 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Jasa Penggandaan | Rp | 278.397.250 | Rp | 537.524.200 | -93,08 |
| Beban Jasa Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | Rp | 45.770.000 | Rp | 492.240.000 | -975,46 |
| Beban Jasa Sewa Kamar/Tempat Penginapan | Rp | 65.880.000 | Rp | 21.430.000 | 67,47 |
| Beban Jasa Sewa Sarana Mobilitas Darat | Rp | - | Rp | 21.600.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Sewa Sarana Mobilitas Air | Rp | - | Rp | 6.000.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Sewa Electrik Generating Set | Rp | - | Rp | 14.528.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Sewa Alat Bantu | Rp | - | Rp | 2.400.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Sewa Meja Kursi | Rp | 51.440.000 | Rp | 16.621.000 | 67,69 |
| Beban Jasa Sewa Tenda | Rp | 49.200.000 | Rp | 125.120.000 | -154,31 |
| Beban Jasa Sewa Sound system dan Air | Rp | 60.610.000 | Rp | 67.300.000 | -11,04 |
| Beban Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan | Rp | 40.000.000 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Jasa Sewa Alat Musik | Rp | - | Rp | 5.800.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Sewa Tanaman Hias | Rp | 2.840.000 | Rp | 40.900.000 | -1.340,14 |
| Beban Jasa Makanan dan Minuman Rapat | Rp | 60.208.000 | Rp | 352.640.000 | -485,70 |
| Beban Jasa Makanan dan Minuman Kegiatan | Rp | 1.408.476.000 | Rp | 2.016.522.000 | -43,17 |
| Beban Jasa Pakaian Dinas Harian (PDH) | Rp | 65.650.000 | Rp | 94.135.000 | -43,39 |
| Beban Jasa Pakaian Dinas Batik | Rp | - | Rp | 8.850.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Pakaian kerja lapangan | Rp | 6.100.000 | Rp | 111.967.000 | -1.735,52 |
| Beban Jasa Pakaian Batik Tradisional | Rp | 26.300.000 | Rp | 118.375.000 | -350,10 |
| Beban Jasa Pakaian Bercorak Kesenian | Rp | - | Rp | 5.500.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Konsultasi Perencanaan | Rp | 44.700.000 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Jasa Konsultasi Manajemen | Rp | 347.999.500 | Rp | 349.320.500 | -0,38 |
| Beban Jasa Konsultasi Software Aplikasi | Rp | 184.955.000 | Rp | 28.663.000 | 84,50 |
| Beban Jasa Konsultasi Survey | Rp | 95.000.000 | Rp | 49.415.200 | 47,98 |
| Beban Jasa Hadiah Prestasi Bidang | Rp | 42.500.000 | Rp | 95.500.000 | -124,71 |
| Beban Jasa Hadiah Prestasi Bidang | Rp | - | Rp | 27.000.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Bantuan Sosial Berupa Barang | Rp | - | Rp | 166.000.000 | 0,00 |
| Beban Jasa Uang Saku | Rp | 2.243.700.000 | Rp | 4.926.100.001 | -119,55 |
| Beban Jasa Uang Makan Tambahan (Extra | Rp | 3.000.000 | Rp | 12.000.000 | -300,00 |
| Beban Jasa Kesenian Tradisional | Rp | 1.500.000 | Rp | 10.000.000 | -566,67 |
| Beban Jasa Kesenian Modern | Rp | 9.500.000 | Rp | 11.250.000 | -18,42 |
| Beban Jasa Narasumber/Instruktur | Rp | 2.977.150.000 | Rp | 4.235.100.000 | -42,25 |
| Beban Jasa Tenaga Ahli | Rp | 285.450.000 | Rp | 606.854.000 | -112,60 |
| Beban Jasa Pendamping | Rp | 5.000.000 | Rp | 33.250.000 | -565,00 |
| Beban Jasa Tenaga Kerja Lapangan | Rp | 221.650.000 | Rp | 179.400.000 | 19,06 |
| Beban Jasa Operator/Administrasi/Teknis | Rp | 108.000.000 | Rp | 178.200.000 | -65,00 |
| Beban Jasa Pembayaran kepada Pihak ketiga | Rp | 11.760.000 | Rp | 28.000.000 | -138,10 |
| Beban Jasa Dokumentasi | Rp | 69.025.000 | Rp | 127.926.000 | -85,33 |
| Beban Jasa Dekorasi | Rp | 30.185.000 | Rp | 30.220.000 | -0,12 |
| Beban Jasa Promosi dan Publikasi | Rp | 348.355.000 | Rp | 475.189.000 | -36,41 |
| Beban Jasa Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | Rp | 372.050.000 | Rp | - | 100,00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **10.063.201.094** | **Rp** | **18.307.971.401** | **-81,93** |

*Beban Pemeliharaan Rp358.235.902*

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp358.235.902 dan Rp420.574.156 mengalami penurunan sebesar -81,93 persen.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

***Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018***

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Pemeliharaan Jasa Service | Rp | 237.535.752 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | Rp | 43.763.550 | Rp | - | 100,00 |
| Beban Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB | Rp | 36.893.200 | Rp | 26.418.400 | 28,39 |
| Beban Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | - | Rp | 225.975.604 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan Komputer | Rp | 29.185.000 | Rp | 37.535.000 | -28,61 |
| Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor | Rp | 7.158.400 | Rp | 30.000.000 | -319,09 |
| Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan | Rp | - | Rp | 100.645.152 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi | Rp | 3.700.000 | Rp | - | 100,00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **358.235.902** | **Rp** | **420.574.156** | **-17,40** |

*Beban Perjalanan Dinas Rp1.478.874.959*

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.478.874.959 dan Rp1.614.205.324 mengalami penurunan sebesar -9,15 persen.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:.

***Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018***

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp | 586.771.675 | Rp | 376.533.341 | 35,83 |
| Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp | 871.880.284 | Rp | 1.182.599.583 | -35,64 |
| Beban Perjalanan Dinas Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | Rp | 13.672.000 | Rp | 55.072.400 | -302,81 |
| Beban Perjalanan Dinas Pengiriman Bimbingan Teknis | Rp | 6.551.000 | Rp | - | 100,00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **1.478.874.959** | **Rp** | **1.614.205.324** | **-9,15** |

*Beban Bunga Rp0*

## D.7 Beban Bunga

Beban Bunga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bunga Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| | Rp - | Rp - | 0,00 |
| | Rp - | Rp - | 0,00 |
| **Jumlah** | **Rp -** | **Rp -** | **0,00** |

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

## D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial | Rp - | Rp - | 0,00 |
| **Jumlah** | **Rp -** | **Rp -** | **0,00** |

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.017.127.663*

## D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.017.127.663 dan Rp815.625.637 mengalami kenaikan sebesar 19,81 persen.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp | 982.670.163 | Rp | 781.168.137 | 20,51 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | Rp | - | Rp | - | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan | Rp | - | Rp | - | 0,00 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | Rp | - | Rp | - | 0,00 |
| **Jumlah Penyusutan** | **Rp** | **982.670.163** | **Rp** | **781.168.137** | **20,51** |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | Rp | 34.457.500 | Rp | 34.457.500 | 0,00 |
| Beban Penyusutan aset lain-lain | Rp | - | Rp | - | 0,00 |
| **Jumlah Amortisasi** | **Rp** | **34.457.500** | **Rp** | **34.457.500** | **0,00** |
| **Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **Rp** | **1.017.127.663** | **Rp** | **815.625.637** | **19,81** |

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0*

## D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek | Rp | - | Rp | - | 0,00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang | Rp | - | Rp | - | 0,00 |
| **Jumlah** | **Rp** | **-** | **Rp** | **-** | **0,00** |

*Beban Lain-lain Rp0*

## D.13 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Penyisihan Piutang atas Beban Lain-lain untuk Tahun 2019 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

*Rincian Beban Lain-lain Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN JENIS BEBAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | 0,00 |
| **Jumlah Penyusutan** | **Rp -** | **Rp -** | **0,00** |

*Kegaiatan Non Operasional Rp0*

## D.12 Kegaiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dna fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegaiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | Rp - | Rp - | 0,00 |
| **Surplus (Defisit) dari Kegaitan Non Operasional** | **Rp -** | **Rp -** | **0,00** |

*Pos Luar Biasa Rp0*

## D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN | Tahun 2019 | Tahun 2018 | Naik (Turun) % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Luar Biasa | Rp - | Rp - | 0,00 |
| Beban Luar Biasa | Rp - | Rp - | 0,00 |
| **Jumlah** | **Rp -** | **Rp -** | **0,00** |

# E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp3.776.990.682*

## E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.776.990.682 dan Rp2.586.717.695 mengalami kenaikan sebesar 68,49 persen.

*Surplus (Defisit) LO -Rp30.338.218.468*

## E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) periode yang berakhir pada 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar -Rp30.338.218.468 dan -Rp34.984.698.115 mengalami kenaikan sebesar 115,32 persen.

*Koreksi Nilai Persediaan Rp0*

## E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

| Jenis Persediaan | Koreksi |
|---|---|
| Barang Konsumsi | Rp - |
| Suku Cadang | Rp - |
| Barang Persediaan Lainnya | Rp - |
| **Jumlah** | **Rp -** |

*Koreksi Aset Tetap Rp0*

## E.9 Koreksi Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2019 sebesar Rp86.616.195 .

*Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin bersumber dari Mutasi Aset Tetap Masuk dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp108.647.195 dan Mutasi Aset Tetap Keluar sebesar Rp22.031.000 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .*

*Rincian Koreksi Aset Tetap*

| Jenis Aset Tetap | Koreksi |
|---|---|
| Mutasi Aset Tetap Masuk | Rp 108.647.195 |
| Mutasi Aset Tetap Keluar | Rp 22.031.000 |
| **Jumlah** | **Rp 86.616.195** |

*Koreksi Aset Lainnya Rp0*

## E.11 Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Atas Aset Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Aset Lainnya untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Beban*

| Jenis Beban | Jumlah Koreksi |
|---|---|
| Beban Pegawai | Rp - |
| Beban Jasa | Rp - |
| **Jumlah** | **Rp -** |

*Ekuitas Akhir Rp4.035.086.301*

## E.13 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada tanggal 31 December 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.035.086.301 dan Rp3.776.990.682 mengalami kenaikan sebesar 93,60 persen.

## F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian penting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) setelah tanggal Neraca tidak ada permasalahan yang mendasar pada saat penyusunan laporan akhir tahun ini.

### F.2 INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk informasi tambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dapat digambarkan perbandingan perolehan anggaran maupun realisasi tahun 2017 dengan tahun 2016 sebagai informasi bahwa OPD ini baru terbentuk tahun 2017.

b. Perlu kami informasikan bahwa dalam menatausahakan tata kelola keuangan terhadap rekapitulasi register per 31 December 2017.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melalui pencatatan yang dilakukan Satuan PPK dan Satuan Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan berbagai Berkas dokumen SPP dan SPM/SP2D sebesar Rp31.040.000.850 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Nilai SP2D |
|---|---|
| - SPP/SPM/SP2D UP sebesar | 500.000.000 |
| - SPP/SPM/SP2D TU sebesar | - |
| - SPP/SPM/SP2D GU sebesar | 4.116.876.166 |
| - SPP/SPM/SP2D LS sebesar | 26.154.739.051 |
| - SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar | 268.385.633 |
| **Total Nilai SP2D** | **31.040.000.850** |
| **Jumlah Nilai Belanja SP2D** | **30.540.000.850** |
| **Pengembalian Belanja** | **12.546.413** |
| **Total Nilai Belanja Sesuai LRA** | **30.527.454.437** |
| - SPP/SPM/SP2D UP sebesar | 500.000.000 |
| - SPP/SPM/SP2D TU sebesar | - |
| **Jumlah SP2D UP + TU** | **500.000.000** |
| - SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar | 268.385.633 |
| **SP2D UP + TU - NIHIL** | **231.614.367** |
| **STS TU** | **-** |
| **STS UP** | **231.614.367** |
| **Jumlah STS** | **231.614.367** |
| **NILAI KAS JUMLAH SP2D UP + TU - NIHIL - STS** | **-** |

Dapat kami jelaskan Total Realisasi Belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung di rinci pada tabel berikut ini ;

## LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2017

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3.239.780.978,01 | 3.161.608.287,00 | 97,59 |
| 2 | Belanja Tunjangan Keluarga | 311.500.000,00 | 270.724.316,00 | 86,91 |
| 3 | Belanja Tunjangan Jabatan | 256.961.625,00 | 247.100.000,00 | 96,16 |
| 4 | Belanja Tunjangan Umum | 130.600.671,00 | 109.185.000,00 | 83,60 |
| 5 | Belanja Tunjangan Beras | 176.820.458,99 | 152.733.780,00 | 86,38 |
| 6 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 14.000.000,00 | 4.877.661,00 | 34,84 |
| 7 | Belanja Pembulatan Gaji | 97.778,00 | 50.043,00 | 51,18 |
| 8 | Belanja Iuran BPJS Kesehatan | 104.218.645,00 | 88.287.236,00 | 84,71 |
| 9 | Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan | 33.544.844,00 | 25.418.593,00 | 75,77 |
| 10 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 12.427.825.000,00 | 12.087.881.525,00 | 97,26 |
| 11 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 148.650.000,00 | 29.800.000,00 | 20,05 |
| | **Jumlah** | **16.844.000.000,00** | **16.177.666.441,00** | **96,04** |

## LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah** | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset | 108.578.000 | 92.960.690 | 85,62 |
| 2 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 233.183.800 | 225.026.400 | 96,50 |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.516.523.600 | 1.387.206.192 | 91,47 |
| 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 520.150.000 | 306.413.952 | 58,91 |
| 5 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | 1.844.630.950 | 1.560.151.194 | 84,58 |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 31.489.000 | 28.489.000 | 90,47 |
| 7 | Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah | 468.067.000 | 458.268.841 | 97,91 |
| 8 | Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan | 20.000.000 | 18.608.000 | 93,04 |
| 9 | Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan | 233.991.200 | 225.356.000 | 96,31 |
| | **Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera** | | | |
| 10 | Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak | 563.532.000 | 540.188.000 | 95,86 |
| 11 | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | 1.822.416.000 | 1.685.227.500 | 92,47 |
| 12 | Peningkatan Kualitas Keluarga | 1.419.257.850 | 1.358.272.850 | 95,70 |
| | **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak** | | | |
| 13 | Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | 1.536.855.000 | 1.519.098.500 | 98,84 |
| 14 | Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak | 1.006.030.000 | 995.112.000 | 98,91 |
| 15 | Perlindungan Khusus Terhadap Anak | 533.050.000 | 529.450.000 | 99,32 |
| | **Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | |
| 16 | Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan | 152.283.000 | 134.072.600 | 88,04 |
| 17 | Pembinaan Administrasi Sebagai Data dan Informasi Pencatatan Sipil | 140.611.000 | 130.800.000 | 93,02 |
| 18 | Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 323.368.000 | 288.711.999 | 89,28 |
| 19 | Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) | 477.772.000 | 404.671.000 | 84,70 |
| 20 | Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK) | 477.731.600 | 370.724.100 | 77,60 |
| 21 | Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) | 477.774.000 | 405.962.000 | 84,97 |
| | **Program Kependudukan dan Keluarga Berencana** | | | |
| 22 | Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk | 534.436.000 | 533.811.178 | 99,88 |
| 23 | Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana | 418.487.000 | 410.049.000 | 97,98 |
| 24 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana | 763.600.000 | 740.891.000 | 97,03 |
| | **Jumlah** | **15.623.817.000** | **14.349.521.996** | **91,84** |

c. Penertiban Pegawai antara lain :

Dapat diinformasikan bahwa pegawai sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang ASN dari mutasi masuk 2 (dua) pegawai dan ada 1 (satu) ASN yang meninggal dunia sehingga ASN Tahun 2017 sebanyak 62 (enam puluh dua) dan Tenaga Honorer/P3K sebanyak 26, Dinas ini baru dibentuk Tahun 2016. Data ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sampai dengan akhir Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

d. Organisasi

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.2-Huk/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

   1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/atasan langsung bendahara, dan berwenang menandatangi SPM dan mengesahkan SPJ adalah :

      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**
      NIP : 19681012 198803 2 003
      Jabatan : Kepala DP3AKKB Provinsi Banten

   2) Bendahara Pengeluaran
      Nama : **Siti Fatimah, Sos**
      NIP : 19761107 200112 2 003
      Jabatan : Bendahara Pengeluaran DP3AKKB Provinsi Banten

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 034.05/Kep.4-Huk/2019 tentang Penetapan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang Pembantu Unit Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019 antara lain sebagai berikut:

   1) Pejabat Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang DP3AKKB
      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**
      NIP : 19681012 198803 2 003

2) Pejabat Pengurus Barang Pengguna DP3AKKB
   Nama : **Yuliyanti, S.Ag.M.Si**
   NIP : 19760702 200112 2 001

3) Pengurus Barang Pengguna DP3AKKB
   Nama : **Nurhayati, SE**
   NIP : 19761019 200701 2 008

4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 902/125-DP3AKKB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

   1) Nama : **Nurhayati, SE**
      NIP : 19761019 200701 2 008

   2] Nama : **Yogi Sudirman**
      NIP : 19790714 201409 1 001

5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 902/126-DP3AKKB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

   1] Nama : **Raden Anietha Septhiana, SS, M.Si**
      NIP : 19710912 200112 1 004

   2] Nama : **Henny Halimah, SE**
      NIP : 19780510 200701 2 012

   3] Nama : **Agustina Romaslan S, S.IP**
      NIP : 19780817 200112 2 004

6. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 902/153-DP3AKKB/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

1] Nama : **Raden Anietha Septhiana, SS, M.Si**
NIP : 19710912 200112 1 004

2] Nama : **Yogi Sudirman**
NIP : 19790714 201409 1 001

3] Nama : **Henny Halimah, SE**
NIP : 19780510 200701 2 012

7. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 900/126-DP3AKKB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut :

1] Nama : **Rini Mulyani, SE**
NIP : 19800924 200112 2 004

**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)**

Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang
Serang

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 03 January 2019

Kepala,

**Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si**
NIP. 19681012 198803 2 003